PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216
Telepon (0293) 491004 Faksimile (0293) 491040
Laman : www.temanggungkab.go.id Pos-el : info@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/1371/TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu memperjelas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program kebijakan;

c. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diperlukan pengukuran kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 -2029;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Stategis (Renstra) Sekratriat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, digunakan untuk:

a. Perencanaan tahunan;
b. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
c. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 September 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung

Kipto Susilo

Tembusan:
1. Bupati Temanggung;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Temanggung.

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung
Nomor 050 /..... Tahun 2025
Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (*rumus/perhitungan*)	Metodologi (*berisi bagaimana atau kapan data kinerja dan diolah*)	Sumber Data
A	**Tujuan**				
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien	1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh KemenpanRB atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%)	Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kenerja, dan Evaluasi internal berdasarakan kriteria yang ada pada PermepanRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali	Bagian Organisasi
		2. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Hasil evaluasi kualitas kebijakan publik, melalui penilaian pada dimensi Perencanaan Kebijakan (20%), Implementasi Kebijakan (25%), Evaluasi & Keberlanjutan Kebijakan (30), serta Transparansi & Partisipasi publik (15%), dan profiling penilaian (10%)	Menilai dan mengevaluasi dokumen pendukung atas suatu kebijakan dengan instrumen tertentu setiap dua tahun sekali	Bagian Organisasi

B	**Sasaran**				
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indeks capaian kinerja	menilai dan mengavaluasi capaian kinerja pemerintah daerah. Pelaporan disampaikan kepada pemerintah pusat dan dilakukan setiap tahun sekali. Pelaksanaan EPPD diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Pemerintahan
2	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Hasil penilaian IRH yang dilakukan oleh Kementerian Hukum	Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati, kompetensi JF Perancang Peraturan Perundang-undangan, evaluasi peraturan daerah dan peraturan bupati, serta pelaksanaan pengelolaan JDIH setiap setahun sekali	Bagian Hukum
3	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual dibagi jumlah rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan bina mental spiritual yang	Mengukur jumlah rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual yang terfasilitasi di Kabupaten Temanggung selama 1 (satu) tahun	Bagian Kesra

			disusun dikali 100%		
4	Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi dibagi Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang disusun dikali 100%	Mengukur jumlah kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi di Kabupaten Temanggung selama 1 (satu) tahun	Bagian Pembangunan Bagian Perekonomian
5	Meningkatnya Kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	$IKAD_m = \left(\sum_{i=1} a_i Z_{im} \right) \times 10$ Di mana a1 merupakan bobot dari masing-masing indikator dalam dimensi penggunaan yang telah disesuaikan menjadi skala. Data dan perhitungan IKAD dilakukan secara nasional dan terpusat, bukan oleh daerah. Daerah menerima pembaruan data setiap periode tertentu	IKAD disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu: penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman yang dikembangkan dalam 14 indikator. Penetapan bobot indikator dilakukan berdasarkan pertimbangan pakar (expert judgement) yang dimensi, indikator-indikator turunannya, bobot serta sumber data indikatornya telah ditetapkan. Data dan perhitungan IKAD dilakukan secara nasional dan terpusat, bukan oleh daerah. Daerah menerima pembaruan data setiap periode tertentu	Bagian Perekonomian
5	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Total ITKP = Bobot (SDM) + Bobot (Pemanfaatan Sistem) + Bobot (E-Tendering) + Bobot (E-Purchasing) + Bobot (Non e-Tendering/e-Purchasing) + Bobot (E-Contract) + Bobot (Kematangan UKPBJ)	Mencakup transformasi digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penguatan kelembagaan (seperti UKPBJ), serta penerapan sistem penilaian seperti Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Pendekatan ini menekankan pada	Bagian PBJ

			Keterangan: ITKP hasil penilaian yang dikeluarkan oleh LKPP RI	peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan integritas melalui integrasi sistem, pelatihan berkelanjutan, dan evaluasi kematangan secara berkala dari LKPP RI di UKPBJ setiap tahun	
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) pada perangkat daerah, dengan menghitung Jumlah PD yang berrediat BB atau diatasnya dibagi Jumlah PD dikali 100%	Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kenerja, dan Evaluasi internal berdasarakan kriteria yang ada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali	Bagian Organisasi
7	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah	IKM Sekretariat Daerah	Nilai IKM diambl rata-rata hasil SKM Bagian. Dengan rumus SKM = (total nilai per unsur/ total unsur yang terisi) x nilai penimbang. Hasilnya dikonversi dengan rumus IKM = SKM x 25	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Peyelenggaran Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.	Bagian Umum

C	**Program**				
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
1	Terlaksananya kegiatan keagamaan, fasilitasi rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan keagamaan yang ada dikali 100%	Mengukur jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi selama 1 (satu) tahun	Bagian Kesra
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan dikali 100%	Mengukur jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik selama 1 (satu) tahun	Bagian Kesra
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan zakat	Indeks Zakat Nasional	Indeks Zakat Nasional (IZN) = 0,30X1 + 0,70X2 Keterangan : X1 : Dimensi makro (Regulasi, Dukungan APBN/APBD, Database Lembaga Zakat, Penguatan Jaringan, Literasi dan Dakwah Zakat) X2 : Dimensi mikro (Tata Kelola, Dampak Zakat)	Mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia yang dilakukan oleh BAZNAS dan bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap	Bagian Kesra

				mustahik, Data diperoleh dari Baznas 1 (satu) tahun sekali.	
3	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik	jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang terdata dibagi jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang ada dikali 100%	mengukur jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang ada selama 1 (satu) tahun	Bagian Pemerintahan
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri	persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	Jumlah Kerja Sama yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan dibagi jumlah kerja sama yang dilakukan dikali 100%	mengukur jumlah dokumen kerja sama yang ditindaklanjuti selama 1 (satu) tahun	Bagian Pemerintahan
5	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan di bidang Hukum	Persentase produk hukum yang difasilitasi	jumlah produk hukum yang difasilitasi dibagi jumlah produk hukum yang diajukan dikali 100%	Mengukur jumlah peraturan daerah maupun peraturan bupati yang difasilitasi dalam 1 (satu) tahun	Bagian Hukum
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	jumlah perundangan yang didokumentasikan melalui JDIH dibagi jumlah perundangan yang dibuat dikali 100%	Mengukur jumlah peraturan daerah maupun peraturan bupati yang terdokumentasi pada JDIH dalam 1 (satu) tahun	Bagian Hukum
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara non litigasi dikali 100%	Mengukur jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan dalam 1 (satu) tahun	Bagian Hukum
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara	jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang	Mengukur jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi dalam 1 (satu) tahun	Bagian Hukum

		litigasi	masuk secara litigasi dikali 100%		
		Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diberikan dibagi jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang masuk dikali 100%	Mengukur jumlah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung dalam 1 (satu) tahun	Bagian Hukum
	Program Perekonomian dan Pembangunan				
6	Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi pembangunan	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	Realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah dibagi target fisik kegiatan seluruh perangkat daerah dikali 100%	Mengukur capaian realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah berdasarkan target yang telah dibuat di awal tahun di Kabupaten Temanggung	Bagian Pembangunan
		Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi	Jumlah dokumen kontrak yang diverifikasi dibagi jumlah keseluruhan dokumen kontrak yang harus diverifikasi dikali 100%	Mengukur jumlah dokumen kontrak dengan nilai kontrak diatas 50 juta untuk pengadaan barang/jasa di Kabupaten Temanggung selama 1 (satu) tahun	Bagian Pembangunan
		Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	Jumlah PD (unit kerja) yang menyampaikan laporan tepat waktu dibagi Jumlah PD (unit kerja) dikali 100%	Mengukur ketepatan waktu perangkat daerah dalam menyampaikan laporan fisik kegiatan dan keuangan (setiap tanggal 10 di bulan berikutnya) melalui aplikasi simpelbangda	Bagian Pembangunan

7	Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	Total nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan pada SIRUP dibagi Total nilai pagu anggaran APBD Pengadaan barnag/jasa dikali 100	Membandingkan total nilai pagu barang dan jasa disemua instansi pemerintah kabupaten temanggung yang diumumkan (melalui sistem *e-katalog* atau portal pengadaan pemerintah) dengan total anggaran pengadaan secara keseluruhan, lalu dikalikan 100%. Hasil ini mengukur sejauh mana pengadaan di seluruh intansi di Pemerintah Bupaten Temanggung telah transparan dan diakses oleh publik	Bagian PBJ
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Jumlah paket pengadaan barang/jasa non e-Procurement yang sudah dicatatkan pada SPSE dibagi jumlah keseluruhan paket pengadaan barang/jasa dikali 100	Mengukur seberapa banyak kegiatan pengadaan yang tidak melalui proses tender. semua realisasi belanja pengadaan semua instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung harus tercatat disistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), baik yang transaksional (menggunakan sistem) maupun yang *non traksaksional* (diluar sistem). pelaksanannya untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas proses pengadaan. Hasilnya akan menunjukkan persentase kegiatan pengadaan yang tidak melalui proses tender. Ini menjadi indikator penting untuk mengevaluasi efisiensi dan kepatuhan terhadap peraturan pengadaan	Bagian PBJ

		Presentase Pendampingan proses PBJ	Jumlah Perangkat Daerah dibagi jumlah pendampingan yang dilaksanakan dikali 100	Mencangkup tahap perencanaan (identifikasi kebutuhan, penentuan jenis pengadaan, analisis risiko) dan tahap pelaksanaan (pemilihan penyedia, kontrak, dan serah terima). Pendampingan dilakukan untuk menyamakan persepsi, mengoptimalkan proses, serta mengatasi permasalahan dan memberikan pembaruan peraturan terbaru kepada seluruh instansi di Pemerintah Kabupaten Temanggung	Bagian PBJ
8	Meningkatnya pengelolaan bidang perekonomian	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	Jumlah realisasi ketersediaan barang bersubsidi/Jumlah kebutuhan barang bersubsidi dikali 100%	Mengukur rasio capaian ketersediaan barang bersubsidi yang meliputi BBM JBT, BBM JBKP, Gas Elpiji 3kg, dan Pupuk Bersubsidi yang sumber datanya diperoleh dari berbagai pihak secara berkala dibandingkan dengan kuota kebutuhan barang bersubsidi Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan pada awal tahun.	Bagian Perekonomian
		Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan/Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi dikali 100%	Mengukur rasio jumlah penyelesaian laporan permasalahan barang bersubsidi yang meliputi BBM JBT, BBM JBKP, Gas Elpiji 3kg, dan Pupuk Bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu satu tahun berjalan, dibandingkan dengan	Bagian Perekonomian

				laporan permasalahan barang bersubsidi yang diterima baik melalui surat resmi maupun bersumber dari berbagai pihak	
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Jumlah BUMD dengan opini WTP/Jumlah BUMD dikali 100%	Mengukur rasio jumlah BUMD Kabupaten Temanggung yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan hasil audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik yang dilaksanakan setelah akhir tahun berjalan, dibandingkan dengan total BUMD Kabupaten Temanggung (6 BUMD).	Bagian Perekonomian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota				
9	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang terpenuhi dibagi jumlah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dikali 100 %	Menyusun dokumen Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah untuk dilaporkan dan dikumpulkan setiap bulannya ke Dinas/Instansi terkait	Bagian Umum
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) pada	Penilaian, evaluasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat dengan mengumpulkan dokumen serta informasi yang diperlukan. Permintaan keterangan melalui desk/wawancara, serta penyusunan saran perbaikan yang dilaksanakan 1 (satu)	Bagian Umum

			Sekretariat Daerah	tahun sekali.	
11	Meningkatnya kebutuhan kedinasan pimpinan daerah yang terpenuhiTerlaksanan ya pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang seharusnya terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah dikali 100%	Mengukur jumlah kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 1 (satu) tahun berjalan	Bagian Umum
12	Terlaksananya pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	Jumlah Kegiatan Kedinasan Pimpian Daerah yang Terfasilitasi dibagi Jumlah Hari Efektif dikali 100%	Mengukur jumlah kegiatan kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi selama 1 (satu) tahun berjalan	Bagian Prokompim
13	Meningkatnya pengelolaan organisasi dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh KemenpanRB dengan 7 komponen yaitu: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Konsultasi dan Pengaduan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Inovasi dan Pertanyaan Tambahan	Penilaian dan evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan cara Unit pelayanan sebagai locus penilaian menyiapkan data/informasi/dokumen/sarpra s/ dan lainnya untuk dijadikan data digital dan diupload di aplikasi penilaian dengan instrumen penilaian mendasari Permenpan RB Nomor 29 Tahun 22 yang telah dirubah dengan Permenpan Rb Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Permenpa RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menan RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang	Bagian Organisasi

				Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja PenyelengaraanPelayanan Publik	
		Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	Jumlah dokumen peraturan bupati tentang SOTK perangkat daerah dan dokumen evaluasi kelembagaan (kematangan organisasi daerah) serta sk analisis jabatan dan analisis beban kerja yang tersusun	menghitung jumlah dokumen yang selesai disusun bidang kelembagaan dan analisis jabatan pada tahun berkenaan	Bagian Organisasi

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

Pj. Sekretaris Daerah

Kabupaten Temanggung

Kipto Susilo